

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana seseorang merasa aman dan nyaman dalam situasinya baik secara internal maupun eksternal. Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha yang terorganisir atau terstruktur yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi agar kehidupan seseorang sejahtera. Kesejahteraan sosial seseorang dapat dilihat bagaimana orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti apa, apakah terpenuhi atau tidak. Kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2014) menyatakan bahwa: “Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungan secara baik”.

Kesejahteraan sosial dari pengertian di atas menyatakan bahwa suatu keadaan dimana orang-orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara baik maka kehidupan seseorang dapat dikatakan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan secara layak dan interaksi sosial yang baik dapat membuat hidup seseorang merasa lebih baik lagi. Pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander (dalam Fahrudin, 2014) adalah:

Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and healths, and personal and social relationships that permit them

to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai kesejahteraan hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dalam suatu lembaga atau institusi yang sudah dirancang untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar serta membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka serta menjalankan kehidupannya secara sejahtera.

Pengertian kesejahteraan sosial tidak terlepas dari apa yang sudah dirumuskan oleh Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Ketiga hal tersebut membantu individu, kelompok dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat setara dengan yang lainnya sehingga kehidupannya dirasa aman dan nyaman serta sejahtera secara lahir dan batin. Kesejahteraan dalam kehidupan harus setara agar dapat membuat kehidupan di dunia ini tumpang tindih.

2.1.1. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Usaha mengenai kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang harus dicapai, diharapkan agar dapat dilaksanakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada didalam lingkungan sosial serta individu, kelompok dan masyarakat lebih sejahtera dalam melaksanakan kehidupanny. Tujuan kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2014: 10) yaitu :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan kesejahteraan dapat membantu permasalahan kehidupan sehingga sandar kehidupan dan pemenuhan kebutuhan pokok terpenuhi serta kesehatan dan relasi sosial berjalan dengan baik. Penyesuaian diri yang baik di lingkungan masyarakat dapat membantu menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf kehidupan yang sejahtera. Tujuan kesejahteraan sosial menurut Shneiderman (Fahrudin, 2014) yaitu:

- a) *Pemeliharaan sistem*
Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b) *Pengawasan Sistem*
Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah perkembangannya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982).

Tujuan kesejahteraan sosial menjaga keseimbangan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada dan yang sudah tertera dalam kehidupan agar kehidupan tidak tumpang tindih. Kehidupan setiap orang agar terasa sejahtera dan seimbang. Pengawasan yang ada di lingkungan dapat mengakibatkan kesejahteraan seseorang dan berguna bagi keamanan. Mengarahkan perubahan perkembangan kearah yang lebih positif dan yang lebih maju lagi.

2.1.2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan mengurangi tekanan-tekanan masalah sosial yang sedang terjadi atau yang sedang dialami. Permasalahan yang diakibatkan biasanya terjadi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sehingga keberfungsian sosial memiliki beberapa fungsi menurut (Fahrudin, 2014) antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk mempertkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditentukan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial membantu memperkuat hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat dalam hal penanganan masalah-masalah sosial. Fungsi-fungsi ini juga untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan orang secara fisik, emosional, dan sosial. Kesejahteraan sosial juga dapat menyumbangkan langsung maupun tidak langsung dalam proses pengembangan dan pembangunan, serta menyertakan kegiatan-kegiatan untuk penanganan sektor-sektor atau bidang pelayanan.

2.1.3. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang kesejahteraan Sosial sebagai peran kesejahteraan sosial sebagai perbandingan dalam praktik pekerjaan sosial dalam literatur pekerjaan sosial. Bidang-bidang kesejahteraan sosial dibagi menjadi beberapa bagian dan hal ini untuk mengetahui bahwa kesejahteraan sosial memiliki bidang-bidang khusus. Bidang-bidang kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2014) antara lain sebagai berikut:

1. Pekerja sosial dengan anak dan keluarga.
2. Pekerja sosial dengan remaja.
3. Pekerja sosial dengan lanjut usia.
4. Pekerja sosial dengan public/masyarakat.
5. Pekerja sosial koreksional.
6. Pekerja sosial medis.
7. Pekerja sosial dengan penyandang cacat.
8. Pekerja sosial sekolah.
9. Pekerja sosial industry/pekerjaan (*occupational social work*)
10. Pekerja sosial wanita (*feminist social work*).
11. Pekerja sosial dan keluarga berencana.
12. Pekerja sosial dengan narkotika dan hiv/aids.
13. Pekerja sosial psikiatri.
14. Pekerja sosial dan kesehatan mental
15. Pekerja sosial dengan organisasi.

16. Dan masih banyak penyebutan/pembidangan pekerjaan sosial yang lain.

Bidang-bidang kesejahteraan sosial di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki praktik yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi sehingga dapat membantu menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial yang sedang terjadi. Luasnya bidang kesejahteraan sosial membuktikan bahwa kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam kehidupan di masyarakat.

Bidang-bidang kesejahteraan sosial di atas menunjukkan bahwa penelitian ini tergolong kedalam pekerja sosial yang melakukan praktek dengan public/masyarakat, karena membahas tentang suatu tradisi yang berasaskan filantropi di Sindangheula Brebes Jawa Tengah. Objek penelitian ini membahas mengenai masyarakat desa Sindangheua yang masih mempertahankan tradisi kasinoman.

2.2. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah merupakan sebuah pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan individu, kelompok dan masyarakat. Pekerjaan sosial terikat oleh lembaga-lembaga tertentu yang menugaskan ahli atau profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian di dalam bidangnya serta memiliki lisensi pekerjaan sosial.

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial merupakan kegiatan pelayanan sosial untuk membantu menangani permasalahan sosial. Pekerjaan sosial berbeda dengan kegiatan amal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara belas kasihan tanpa

memikirkan kelangsungan keberfungsian sosialnya. Definisi pekerjaan sosial menurut Friedlander (dalam Iskandar, 2013) yaitu:

Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dan relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidak tergantungan secara pribadi dan sosial.

Pekerjaan sosial menentukan bahwa suatu bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh seorang profesional dalam kegiatannya untuk membantu dan meningkatkan keberfungsian seseorang baik secara individu, kelompok dan masyarakat. Pekerjaan sosial melaksanakan pelayanan sosial untuk menangani permasalahan sosial yang sedang dihadapi serta membantu untuk tidak selalu bergantung tetapi membuatnya lebih bersifat mandiri.

Kegiatan-kegiatan pertolongan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial memberikan pelayanan sosial menggunakan metode kelembagaan yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*Body of Knowledge*), kerangka keahlian (*Body of Skill*), dan kerangka nilai (*Body of Value*). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan didasari oleh beberapa ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial seperti ilmu sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Pengertian pekerjaan sosial menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012: 61) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah : “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka”

Fokus utama dari pekerjaan sosial itu sendiri adalah keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan sebuah resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti system pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya.

2.2.2. Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan pertolongan dari awal proses. Adapun peranan yang diemban oleh pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, *broker*, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan evaluator. Peranan-peranan pekerja sosial tersebut mengawal terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik dengan melihat beberapa strategi pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh (Suharto, 2007) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
- d. Meumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, semisal psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang

pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk di dalamnya “orang-orang penting lain” (significant others) yang mempengaruhi klien. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna.

2.2.3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial di lingkungan sosialnya dan meningkatkan kemampuan sosial seseorang dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi serta memberikan kemampuan untuk mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan (dalam Sukoco, 2011) adalah sebagai berikut:

- a. *Enhance the problem solving and coping capacities of people*, peningkatan masalah dan kepastian seseorang. Pekerjaan sosial meningkatkan pemecahan masalah-masalah sosial yang dialami baik itu individu, kelompok, dan masyarakat sehingga masalah dapat diselesaikan dan dapat memastikan bahwa seseorang tersebut kembali berfungsi.
- b. *Link people with systems that provide them with resources, services, and opportunities*. Mengembangkan orang dengan sistem yang menyediakan mereka sumber, pelayanan dan kesempatan. Pekerja sosial mengembangkan dan menghubungkan orang dengan sistem sumber yang

dapat menangani permasalahan sosial yang sedang dihadapi sehingga dapat orang dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang ada.

c. *Promote the effective and humane operation of these systems.*

Mempromosikan operasi efektif dan manusiawi dari sistem ini. Pekerja sosial disini melaksanakan promosi yang secara efektif dan manusiawi dalam melaksanakan sistem yang sudah ada.

d. *Contribute to the development and improvement of social police,*

berkontribusi untuk pengembangan dan perbaikan dari kebijakan sosial. Pekerja sosial melakukan kontribusi dalam perkembangan dan perbaikan yang terjadi agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Tujuan pekerjaan sosial yang ada biasanya biasanya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan manusia serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Pekerja sosial berusaha sebaik mungkin untuk bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial untuk mencapai tujuan-tujuan. Tujuan pekerjaan sosial menurut NASW (dalam Fahrudin, 2014) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Tujuan pekerjaan sosial meningkatkan kemampuan manusia dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi lalu bagaimana mengatasi permasalahan serta bagaimana pengembangannya. Pekerjaan sosial menghubungkan orang dengan sistem sumber yang ada agar mereka mendapat

informasi yang lebih mendalam lagi. Bekerja semaksimal mungkin dan menyetarakan demi keefektifan manusia dan menyiapkan sumber-sumber yang ada. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial agar kebijakan menjadi lebih baik.

2.2.4. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaraannya meliputi fungsi-fungsinya tersendiri, penunjang terhadap tujuannya juga yaitu Max Siporin yang dikutip (Huraerah, 2011) adalah:

- a. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- b. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua. Ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagai berikut: Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu dan keluarga. Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan. Mencegah kemelaratan dan mengurangi kemiskinan, kesukaran sosial, dan kepapaan. Melindungi individu-individu dan keluarga dari bahaya kehidupan, dan memberi kompensasi atas kehilangan karena bencana, ketidakmampuan, kecacatan, dan kematian.
- c. Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan mereka. Mengaktualisasi potensi-potensi untuk produktivitas dan realisasi diri, di pihak orang maupun lingkungan sosialnya, untuk bentuk-bentuk kreatif dan altruistik dari keberfungsian sosial dan kehidupan bersama. Membantu orang mendapatkan kembali atau mencapai tingkat

yang lebih tinggi dari keberfungsian yang memuaskan dan normatif sebagai anggota masyarakat, melalui perbaikan kemampuan dan keterampilan mereka yang tidak berkembang atau rusak, melalui penggunaan secara optimal sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan dari kelompok dan lembaga sosial mereka, dan melalui penyelesaian kesukaran-kesukaran mereka dalam sosial dan kehidupan sosial. Menyediakan pengganti bagi keluarga dan masyarakat dalam memberikan jenis-jenis bantuan pendukung, pengganti, perlindungan dan pencegahan kepada individu dan keluarga. Mengintegrasikan orang satu sama lain, menghubungkan di antara mereka dan menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial mereka khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial mereka.

- d. Mendukung dan memperbaiki tatanan sosial dan struktur kelembagaan masyarakat. Membantu institusi-institusi sosial seperti keluarga, hukum, perawatan, kesehatan, dan ekonomi dalam mengembangkan dan mengoperasikan struktur dan program pelayanan efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk melindungi kepentingan anggotanya. Melaksanakan tindakan-tindakan penyesuaian dan perubahan sosial dan tindakan-tindakan stabilitas dan pengawasan sosial yang efektif, yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa fungsi-fungsi pekerjaan sosial yaitu untuk membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan standar penghidupan yang lebih baik, berusaha mengoptimalkan fungsi mereka

sesuai dengan status yang di emban dalam lingkungan mereka, membantu mendukung dan memperbaiki struktur kelembagaan dalam masyarakat, sehingga dapat membantu mengembangkan bagaimana pelayanan yang efektif agar mereka dapat memenuhi kebutuhan serta mendapatkan perlindungan.

2.2.5. Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan yang profesional, dalam ketentuannya memiliki ketentuan yang harus dipatuhi dalam setiap keberlangsungan proses pertolongan. Menurut Maas (dalam Adi, 1994), ada enam prinsip-prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial:

a. Penerimaan (*Acceptance*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa seorang pekerja sosial menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut terlebih dahulu. Kemampuan pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan banyak membantu perkembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap *acceptance* (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan tidak “kaku” dapat mengungkapkan berbagai perasaan dan permasalahan yang mengganjal dihatinya.

b. Komunikasi (*Communication*)

Prinsip komunikasi ini erat kaitannya dengan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang diungkapkan klien ataupun sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara duduk klien, posisi ataupun letak duduk dalam suatu pertemuan dengan

anggota keluarga yang lain, cara bicara, cara berpakaian, dan lain sebagainya.

c. Individualisasi (*Individualization*)

Prinsip individualisasi, pada intinya menganggap setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga seorang pekerja sosial haruslah menyesuaikan cara memberi bantuan dengan setiap kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

d. Partisipasi (*Participation*)

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus mengajak kliennya untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien ataupun sistem klien juga mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keberhasilan proses pemberian bantuan tersebut. Karena tanpa adanya kerja sama dan peran serta dari klien maka upaya pemberian bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

e. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien ataupun sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan permasalahan yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin bahwa apa yang ia utarakan dalam hubungan kerjasama dengan pekerja sosial akan tetap terjaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

f. Kesadaran diri pekerja sosial (*Worker Self-Awarenes*)

Prinsip *Self-Awarenes* ini menuntut pekerja sosial untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya dalam arti bahwa pekerja

sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui prinsip-prinsip pekerjaan sosial dalam memberikan pertolongan terdiri dari enam prinsip yaitu penerimaan, komunikasi, individualisasi, partisipasi, kerahasiaan, dan kesadaran diri pekerja sosial. Keenam prinsip tersebut harus ditaati serta prinsip tersebut menjelaskan bahwa dalam proses memberikan pertolongan, pekerja sosial berusaha membuat klien merasa percaya dan nyaman kepada pekerja sosial, agar tercapainya tujuan dari proses pertolongan yang tidak merugikan berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

2.3. Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan ketidak sesuaian antara kenyataan yang dialami oleh manusia dengan harapan yang ingin dicapai, dalam kehidupan sehari-hari masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, mereka sering dihadapkan pada suatu masalah yang dapat diakibatkan dari hubungan-hubungannya dengan manusia lain maupun akibat dari perilakunya terhadap lingkungannya.

2.1.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dianggap merugikan orang banyak, oleh sebagian masyarakat masalah sosial dianggap merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan dan berpotensi mengganggu kehidupannya. Perspektif pekerjaan sosial (dalam Kartini Kartono, 1992) yang dikutip oleh (Huraerah: 2011: 4) berpandangan, yang disebut sebagai masalah sosial adalah:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Berdasarkan pandangan di atas dimana masalah sosial yang pertama merupakan tindakan yang melanggar adat-istiadat yang berlaku, dan adat istiadat yang dilanggar tersebut merupakan bagian penting dan diperlukan untuk menjamin kesejahteraan sosial. Kedua masalah sosial dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai situasi yang tidak sesuai dengan kehendak orang banyak, mengancam dan merugikan banyak orang.

2.1.2. Dimensi dan Kategori Masalah Sosial

Masalah sosial memiliki dimensi atau ukuran yang terbagi menjadi beberapa bagian yang penyebabnya disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Dalam (Huraerah, 2011) Masalah sosial dapat lebih difahami dari dimensi-dimensi berikut ini:

- a. Setiap masalah bersifat multidimensional dalam pengertian adanya jaringan faktor-faktor fisik, mental, dan sosial.
- b. Dimensi struktural dan klinis. Masalah sosial berdimensi struktural kalau faktor penyebabnya berakar pada struktur masyarakat. Seperti masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Dimensi klinis kalau masalah sosial berakar pada kekurangan atau kelemahan pada diri individu.
- c. Dimensi absolut dan relatif, misalnya yang terjadi pada kemiskinan. Kemiskinan disebut absolut kalau indikator kemiskinannya berlaku di manapun juga di dunia ini, baik di negara maju maupun berkembang.

Kemiskinan disebut relatif kalau indikatornya hanya berlaku di negara tertentu, misalnya miskin di Amerika Serikat tetapi tidak miskin di Indonesia.

Berdasarkan dimensi-dimensi masalah sosial di atas bahwa masalah sosial merupakan suatu keadaan yang bukan hanya terjadi pada satu bidang kehidupan, akan tetapi masalah sosial yang dialami banyak masalah yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan.

2.1.3. Masalah Sosial Yang dihadapi Bangsa Indonesia

Bukan hanya pada negara lain, Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi berbagai masalah sosial. Beberapa masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia yang cukup menonjol adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan
- b. Pengangguran
- c. Kejahatan
- d. Kenakalan Anak dan Remaja
- e. Penyalahgunaan Narkoba
- f. Pornografi, Pornoaksi, dan Prostitusi
- g. Perjudian
- h. Perkosaan
- i. Gangguan Kejiwaan
- j. Masalah Bencana
- k. Keterlantaran Anak
- l. Lanjut Usia Terlantar
- m. Manalih Kecacatan
- n. n Buruknya Jaminan Sosial
- o. Konflik Sosial
- p. Kerusuhan Sosial
- q. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
- r. Masalah Pengungsi
- s. Masalah HIV/AIDS
- t. Masalah Diskriminasi dan Ketidakadilan
- u. Masalah Daerah Kumuh
- v. Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Buruk
- w. Disharmonisasi Sosial
- x. Menurunnya Solidaritas Sosial
- y. Stres, Depresi, dan Bunuh Diri

z. Disharmonisasi Keluarga

Berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia seperti diatas menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks meliputi berbagai aspek kehidupan yang keselirihannya perlu usaha dalam mengurangi berbagai permasalahan sosial tersebut.

2.4. Tinjauan Tentang Masyarakat

Masyarakat merupakan Sekumpulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain, memiliki kesatuan, saling berinteraksi, dan mempunyai ikatan yang khusus. Akan tetapi hubungan dalam masyarakat bersifat lebih luas dan memiliki bagian-bagian sehingga mereka memiliki kesatuan.

Pengertian Tentang Masyarakat.

2.1.1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006) yang dikutip oleh (Khoerudin, 2015) masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang hidup secara bersama dan saling bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, dan mereka sadar mengatur diri mereka sehingga antara satu dengan

yang lainnya menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki batas-batas yang jelas.

2.1.2. Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Emil Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984) yang dikutip oleh (Khoerudin, 2015) Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang diadalamnya terdapat beberapa unsur. Adapun unsure-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Unsur-unsur masyarakat di atas menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama pada suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, dengan secara sadar bahwa setiap dari mereka merupakan satu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

2.1.3. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa merupakan masyarakat dengan kehidupan yang tenang dimana mereka mudah bersosialisasi antar sesama masyarakat desa lainnya karena saling mengenal antar sesama masyarakat desa. Dalam (Yulianthi, 2015) secara umum, masyarakat pedesaan lebih bersosialisasi dengan kepribadian yang sederhana. Masyarakat pedesaan itu lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka hampir hafal semua penduduk yang tinggal di desa. Masyarakat pedesaan juga sangat ramah terhadap orang asing yang belum dikenalnya. Untuk kepribadian, masyarakat pedesaan lebih terkesan santai karena kerjanya tidak terlalu berat seperti masyarakat perkotaan. Pola interaksi

masyarakat pedesaan adalah dengan prinsip kerukunan dan bersifat horizontal serta mementingkan kebersamaan pola solidaritas sosial masyarakat pedesaan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan.

Berikut ini ciri-ciri karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat umum.

- a. Sederhana
- b. Mudah curiga
- c. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku didaerahnya
- d. Mempunyai sifat kekeluargaan
- e. Lugas atau berbicara apa adanya
- f. Tertutup dalam hal keuangan mereka
- g. Perasaan tidak ada percaya diri terhadap masyarakat kota
- h. Menghargai orang lain
- i. Demokratis dan religius
- j. Jika berjanji akan selalu diingat

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat desa di atas, masyarakat desa merupakan masyarakat yang sederhana, bersifat kekeluargaan, menjunjung tinggi gotong royong dan sikap sopan santun yang masih digunakan. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban community. Adapun yang menjadi ciri masyarakat desa secara umum antara lain:

1. Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
3. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Berdasarkan ciri umum masyarakat desa merupakan masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih mendalam, dalam berkehidupan sehari-hari masih bersifat kekeluargaan, mata pencahariannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian, dan bersifat homogen.

2.5. Tinjauan Tentang Partisipasi

Partisipasi biasanya digambarkan sebagai keikutsertaan suatu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan menyumbangkan beberapa hal dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Sumbangan tersebut dapat berupa pemikiran berupa ide, gagasan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam perawatan, bentuk partisipasi dalam pelaksanaannya dapat berupa tenaga, materi dan lain-lain.

2.5.1. Pengertian Partisipasi

Sedangkan bentuk partisipasi juga dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung seperti ikut memelihara serta ikut merawat hasil dari suatu kegiatan. Menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2019) mendefinisikan bahwa: “Partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.”

Berdasarkan definisi diatas dijelaskan bahwa partisipasi merupakan bagian dari salah satu syarat dapat terlaksana dan keberhasilan suatu kegiatan serta keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat untuk dapat menyumbangkan berbagai bentuk hal yang dapat mendukung terselenggaranya suatu kegiatan yang sebelumnya telah melalui proses rangsangan yang dapat memacu keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

2.5.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi memiliki berbagai proses pemahaman mengenai suatu hal dan bagaimana ia bekerjasama dengan orang lain berdasarkan nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama, sehingga seseorang atau sekelompok

anggota masyarakat akan ikut serta dalam suatu kegiatan apabila rangsangannya juga baik dan dianggap dapat member keuntungan atau perubahan yang akan diperoleh apabila ia ikut serta dalam kegiatan tersebut. Adapun bentuk-bentuk partisipasi menurut Hoofsteede seerti dukutip (Khairuddin, 1992) (dalam Huraerah 2011) membagi partisipasi kedalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal ataupun anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Partisipasi berdasarkan bentuk-bentuk di atas terdiri dari partisipasi inisiasi (*inisiation participation*), partisipasi legitimasi (*legitimation participation*), partisipasi eksekusi (*execution participation*), beberapa bentuk partisipasi tersebut merupakan syarat dapat terlaksana dan keberhasilan suatu kegiatan serta keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat untuk dapat menyumbangkan berbagai bentuk hal yang dapat mendukung terselenggaranya suatu kegiatan yang sebelumnya telah melalui proses rangsangan yang dapat memacu keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

2.6. Tinjauan tentang Filathropi

Filantropi sosial yang oleh masyarakat Indonesia dikenal sebagai kestiakawanan sosial, solidaritas sosial, atau kedermawanan sosia sebetulnya bukanlah hal baru. Kegiatan ini sudah berabad-abad. Di masyarakat kita, sudah menjadi tradisi bahwa keluarga, kerabat, dan tetangga paling membantu jika salah

satu dari mereka ada yang tertimpa musibah. Filantropi merupakan bentuk wujud cinta kasih antar sesama manusia, dimana antara satu dengan yang lainnya saling member dan melayani kepada yang membutuhkan.

2.6.1. Pengertian Filantropi

Filantropi merupakan wujud kesalehan sosial manusia dimana antara satu manusia dengan manusia lainnya merelakan sesuatu seperti (tenaga, materi dan waktu) untuk membantu manusia lain yang membutuhkan. Menurut (Midgley, 2005) (dalam Rahmawati, 2015:100) memberikan batasan kesejahteraan dengan merujuk pada, suatu kondisi sosial, bukan pada kegiatan amal yang dilakukan kelompok-kelompok, juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah. Filantropi diartikan sebagai kegiatan yang berusaha untuk mengangkat kesejahteraan sosial dengan mendukung pembagian milik pribadi, misalnya dengan kegiatan amal dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas filantropi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu untuk melakukan kegiatan amal bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan, akan tetapi dalam konteks ini dimana bantuan yang dimaksud bukanlah bantuan yang diberikan bukan kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan juga bukan bantuan public yang diberikan oleh pemerintah.

2.6.2. Filantropi Sebagai Salah Satu Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan penunjang dalam aktivitas keilmuan dan praktik yang digunakan dalam kesejahteraan sosial. Dalam perspektif pekerjaan sosial, Midgley (dalam Huraerah, 2011) mencatat ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yaitu:

pertama, filantropi sosial, yang bergantung pada donasi-donasi pribadi, relawan, dan organisasi *non-profit* untuk memenuhi kebutuhan, mencari solusi terhadap masalah sosial yang ada, dan menciptakan kesempatan sosial yang baru; kedua, pekerjaan sosial, yang bergantung pada tenaga-tenaga profesional yang mendukung tujuan-tujuan kesejahteraan sosial; dan ketiga, *administrasi sosial*, yang bergantung pada intervensi pemerintah melalui pelayanan-pelayanan sosial resmi. Pendekatan yang ketiga ini juga dikenal *pelayanan sosial* atau *kebijakan sosial*. Menurut Midgley (dalam Adi, 2005: 51) pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. **Filantropi Sosial**
Filantropi sosial terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pelaku dari filantropi disebut filantropis.
2. **Pekerja Sosial**
Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Namun, perkembangan pekerjaan sosial tidak lepas dari perkembangan filantropi. Sejak abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar diseluruh dunia.
3. **Administrasi Sosial**
Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui penyediaan berbagai pelayanan sosial. Pendekatan ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Undang-undang tentang kemiskinan yang dikeluarkan oleh ratu Elisabeth I.
4. **Pembangunan Sosial**
Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, dimana pembangunan ini dilakukan untuksaling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.

Pendekatan kesejahteraan sosial yang terdiri dari filantropi sosial, pekerja sosial, administrasi sosial, dan pembangunan sosial. Berawal dari filantropi sosial yang pertama mempromosikan kesejahteraan sosial yang berbasis pada suatu kegiatan untuk membantu sesama atau kegiatan amal untuk saling membantu satu sama lain, kemudian hadir pekerja sosial yang merupakan tenaga profesional sebagai profesi yang memberikan pertolongan secara tersistematis dan terstruktur. Administrasi kesejahteraan sosial hadir sebagai bidang yang berupaya untuk mempromosikan bidang kesejahteraan sosial melalui program-program terkait dengan upaya dalam kesejahteraan sosial. Pengembangan sosial menjadi pelengkap pendekatan-pendekatan sebelumnya dengan berusaha melakukan perubahan sosial.

2.7. Tinjauan Tentang Modal Sosial

Modal merupakan potensi kekuatan yang ada dalam masyarakat yang berasal dari hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya, interaksi yang terjadi didalam kelompok merupakan investasi sehingga dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

2.7.1. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial merupakan hubungan yang telah terjalin antara manusia yang memungkinkan didalamnya terjalin kerjasama. Cohen dan Prusak (dalam Huraerah, 2011) berpendapat bahwa modal sosial adalah hubungan yang aktif diantara manusia: rasa percaya, saling pengertian, kesamaan nilai, dan dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

Berdasarkan pendapat di atas Modal sosial merupakan hasil dari hubungan yang dilakukan secara aktif antara sesama manusia, yang ditimbulkan berdasarkan rasa kepercayaan diantara mereka, saling pengertian, kesamaan nilai yang dimiliki, dimana hal tersebut dapat memunculkan perilaku yang mengikat anggota yang didalamnya memungkinkan terjadinya kerjasama.

2.7.2. Unsur-Unsur Modal Sosial

Modal sosial merupakan faktor yang dapat memperkuat masyarakat, dengan modal sosial masyarakat mempunyai kekuatan dalam upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. (Hasbullah, 2006) (dalam Suaib, 2017) mengutarakan enam acuan niş dan unsur pokok yang merupakan ruh modal sosial berdasarkan berbagai pengertian modal sosial yaitu:

2. Partisipasi dalam suatu jaringan/Participation in a network, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berkedampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok
3. Reciprocity, yaitu kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
4. Kepercayaan/Trust, adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakni bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial,

5. Norma sosial/Social norms, merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.
6. Nilai-nilai/Value, yaitu sesuatu ide yang telah turun menurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia akan tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.
7. Tindakan yang proaktif/Proactive action, yakni keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial

Berdasarkan penjelasan di atas unsur-unsur pokok modal sosial terdiri dari partisipasi, reciprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan yang proaktif, dimana modal sosial diperlukan didalam masyarakat karena keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan dapat menjadi dasar terselenggaranya suatu kegiatan, selanjutnya dalam suatu kegiatan dapat saling tukar menukar kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, yang didalamnya tercipta kepercayaan dimana warga masyarakat yakin untuk saling mendukung satu sama lain, sesuai dengan norma sosial yang berlaku serta nilai-nilai yang diturunkan

dari leluhur mereka yang dianggap penting dan benar yang berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku masyarakat, untuk memperkaya hubungan-hubungan mereka yang menguntungkan kelompok.

2.8. Tinjauan tentang Desa

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekumpulan keluarga dan memiliki pemerintahan sendiri, dipimpin oleh kepala desa, memiliki batas wilayah tertentu, menyelenggarakan, mengatur, mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, dan merupakan unit terkecil dari pemerintahan.

2.8.1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut (Sutarjo Kertodikusumo, 2002) (dalam Bawono, 2019) pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas desa merupakan kesatuan hukum dimana didalamnya ditempati oleh masyarakat mempunyai pemerintahan sendiri, yang dalam fungsinya mereka dapat mengadakan, mengurus, mengatur kepentingan anggota masyarakat desa.

2.8.2. Jenis Desa

Dalam (Bawono, 2019) Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*.

Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis sebagai berikut.

1. Desa Adat (self governing community)
Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.
2. Desa Otonom (local self government)
Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal.
3. Desa Administratif
Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai the lo-cal state government. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

Berdasarkan jenis desa di atas, desaterbagi menjadi tiga jenis yaitu desa adat dimana masyarakatnya lebih bersifat tradisional dalam menghidupi masyarakatnya, desa otonom merupakan desa yang pengaruh adatnya tidak terlalu kuat dimana desa ini merupakan peralihan dari desa adat. Dan terakhir adalah desa administrative merupakan desa yang sudah jelas pemerintahannya dan berada dalam sub sistem dari pemerintah kabupaten atau kota.

2.9. Tinjauan Tentang Tradisi

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti yang dikatakan (Shils, 1981), tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit

ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini (dalam Piotr Sztompka, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari dulu dan masih bertahan hingga saat ini. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi warisan sosial yang eksistensinya masih dapat hidup dan bertahan belum ada pengrusakan, penghancuran, dan belum ditinggalkan sebagai salah satu dapat bertahan hingga saat ini.

2.10. Tinjauan Tentang Tradisi Sinoman

Masyarakat Jawa, dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi sosial. Pada dasarnya, masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang menerapkan tata nilai sosial ‘hidup rukun’ atau ‘tepo seliro’ dan ‘tolong menolong’ atau ‘guyub’ dalam kehidupan sosial sehari-harinya. Dalam (Kholiq, 2002) Sinoman atau yang lazim disebut iriban dapat dipahami dalam dua pengertian, yakni memberikan sumbangan atau ‘nitip barang’ dan menagihnya kembali ketika sedang membutuhkan. Di sinilah, sering muncul permasalahan, khususnya dalam pengertian kedua. Kadang ketika orang yang ‘nitip barang’ sedang membutuhkan, seorang yang dititipi ‘mau tidak mau harus menyediakan barang yang semisal dan sebandig dengan barang yang dititipkan.

2.10.1. Berbagai Kegiatan Dalam Tradisi Sinoman

Dalam tradisi Sinoman memiliki banyak kegiatan yang seluruhnya ditujukan untuk membantu dan meringankan beban orang yang membutuhkan.

Dalam (Kholiq, 2002) menjelaskan ragam Tradisi Sinoman yang disebutkan berikut adalah hanya beberapa model sinoman:

1. Ngedekke Omah atau mendirikan rumah

Mendirikan rumah atau tempat tinggal dalam prakteknya membutuhkan cukup dana. Karena banyaknya kebutuhan, tidak jarang dana atau anggaran yang tersedia sangat kurang dari memadai. Banyak di antara mereka yang sudah menabung barang material yang dibutuhkan untuk membangun rumah memalului sinoman. Biasanya mereka merencanakan jauh sebelum membangun rumah, tentang segala kebutuhan dalam mendirikan sebuah rumah dengan ikut sinoman atau menaruh barang material seperti kayu, semen, pasir pada tetangga yang membangun duluan. Maka pada gilirannya, setelah dirasa cukup material yang tersimpan di tempat tetangga, barulah diputuskan waktu yang tepat untuk mendirikan rumah. Sedangkan kekurangannya, mereka dapat membuka peluang bagi para tetangga atau famili mereka untuk ikut sinoman atau menaruh barang-barang yang dibutuhkan. Sehingga, kekurangan dana atau anggaran tidak menghalangi rencana mendirikan rumah, karena ditopang oleh hasil sinoman. Dilihat dari sisi ragam yang didapat dari sinoman yang ditawarkan oleh yang berhajat dalam mendirikan rumah, terdapat antara lain: barang-barang material, seperti semen, kayu, genteng, kaca, batu, paku, batu bata dan sebagainya. Bentuk lainnya dapat berupa rokok, beras, atau kebutuhan dapur lainnya yang dibutuhkan untuk

melayani para tukang dan pekerja sambatan. Di samping bentuk matereal dalam membangun rumah, terdapat pula bentuk sinoman tenaga atau jasa, seperti para pekerja sambatan yang ikut membantu dalam mendirikan rumah. Biasanya si punya rumah (yang berhajat) menghitung berapa hari mereka ikut sambatan, dan jika pekerja punya hajat, ia harus membayarnya dengan menjadi pekerja sambatan paling tidak dalam hitungan hari yang sama.

2. Ngerjake Sawah (menggarap sawah atau ladang)

Menggarap sawah membutuhkan banyak tenaga. Karena banyaknya tenaga yang dibutuhkan tidak sedikit di antara warga yang merasa keberatan untuk menggaji (membayar) tenaga yang dibutuhkan tersebut. Di sisi lain, ketika musim tanam tiba, mencari tenaga menjadi kesulitan tersendiri, karena masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Maka sebagian dari mereka melakukan ‘sinoman pekerjaan’ atau ‘sinoman tenaga’ dalam mengerjakan sawah atau ladang, dengan hitungan atau perimbangan tenaga laki-laki dengan laki-laki dan tenaga perempuan dengan perempuan, di samping terdapat perimbangan jumlah hari kerja.

3. Duwe Gawe (Mempunyai Hajat)

Secara umum duwe gawe atau hajatan pada prakteknya membutuhkan biaya yang relatif banyak, terutama pada momen acara seperti duwe gawe manten, ngunduh mantu atau sunatan. Di samping ngundang banyak tamu atau kondangan, juga pihak yang berhajat mengundang sanak tetangga dan famili untuk acara

selamatan, sebagai serangkaian dari kegiatan duwe gawe. Maka tuan rumah harus menyediakan suguhan lebih untuk undangan dalam kondangan dan para undangan selamatan. Maka wajar apabila seseorang atau hendak mempunyai hajat sebagaimana disebut di atas haruslah mempersiapkan dana yang cukup. Karena menyelenggarakan upacara hajatan atau duwe gawe membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tenaga yang dibutuhkan untuk membantu cukup banyak, artinya jika ditanggung sendiri dirasa cukup berat, maka masyarakat Desa Bermi telah lama mentradisikan sinoman dalam menyelenggarakan hajatan atau duwe gawe. Praktek sinoman dalam hajatan atau duwe gawe, modelnya hampir sama dengan sinoman ngedekke rumah, hanya saja dalam sinoman hajatan atau duwe gawe, barang yang ditawarkan adalah barang yang dibutuhkan bagi orang duwe gawe, seperti beras, daging, kelapa, rokok, panganan dan sebagainya.

4. Kesripahan (Upacara untuk Orang yang Meninggal)

Dalam realitanya, menyelenggarakan upacara atau acara selamatan bagi arwah keluarga yang telah meninggal membutuhkan dana yang relatif banyak, karena di samping shohibul musibah harus menyuguhkan makanan secukupnya, baik untuk dimakan di tempat maupun untuk dibawa pulang para undangan sebagai buah tangan. Dan sudah menjadi tradisi bahwa makanan yang disediakan harus beraneka ragam, terdiri dari bermacam kue, nasi serta beberapa lauk pauk atau daging. Karena tradisi tersebut sudah sudah

mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, sehingga kadang-kadang sering dipaksakan untuk dilaksanakan walaupun sedang tidak punya uang. Dan mereka merasa malu bila makanan yang disuguhkan atau dibawa pulang oleh para undangan hanya ala kadarnya. Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara atau upacara selamatan bagi arwah yang telah meninggal, maka sinoman menjadi salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah kekuarangan dana dalam upaya merealisasikan upacara selamatan tersebut. Bentuk sinoman dalam konteks ini, hampir sama dengan sinoman hajatan atau duwe gawe, yakni berupa barang-barang kebutuhan dapur yang diperuntukkan untuk menyuguhi tamu atau undangan, diantaranya beras, gula, daging, rokok, kelapa dan kebutuhan dapur lainnya.

